

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan IV 2024, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm) lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 0,44% (mtm). Dengan pencapaian tersebut maka secara tahunan inflasi Jawa Barat menjadi 1,64% (yoy). Inflasi Jawa Barat pada bulan Desember 2024 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman & tembakau serta kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Tren penurunan inflasi ini telah terjadi sejak bulan Agustus 2024. Inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran merupakan hasil konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking* serta sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi/Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Adapun andil inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,31% (mtm). Andil inflasi dari kelompok ini disumbang oleh komoditas telur ayam ras sebesar 0,10% (mtm), cabai merah sebesar 0,06% (mtm), minyak goreng sebesar 0,04% (mtm), cabai rawit sebesar 0,03% (mtm), dan bawang merah sebesar 0,03% (mtm). **Di sisi lain, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,02% (mtm).**

Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami inflasi. Inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 0,84 persen dan terendah di Kabupaten Bandung sebesar 0,20 persen.

Berdasarkan pencapaian inflasi secara *year-to-date*, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan ruang sisa terendah untuk mencapai target RKPD 2024 sebesar 2,5% sehingga perlu adanya upaya pengendalian inflasi utamanya terkait pengendalian inflasi pangan yang lebih massif dan intensif di kedua kota tersebut. Di sisi lain, Kota Sukabumi telah melebihi target inflasi 2,5% yakni mencapai 2,59% (ytd) pada bulan Desember 2024.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-IV 2024 yaitu:

1. PT Pertamina menurunkan kembali harga bensin dan solar non subsidi TMT 2 September 2024.
2. Rata-rata harga emas dan harga kiopi di pasar internasional mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir
3. Penurunan produksi aneka cabai sejak Juni 2024 disebabkan oleh berbagai faktor seperti pergeseran jadwal tanam, kurangnya ketersediaan air, cuaca panas dan serangan OPT.

Faktor cuaca selama tahun 2024 memengaruhi fluktuasi harga khususnya komoditas hortikultura. Pada dasarian II Desember 2024, sebagian besar wilayah Jawa Barat masih mengalami musim hujan.

5. Fluktuasi harga jagung sebagai pakan ternak menyebabkan kenaikan harga telur ayam di tingkat peternak.
 6. Harga Referensi komoditas minyak kelapa sawit (CPO) naik 11,4 persen dibanding periode November 2024. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi global.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sbb:

1. *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota ke Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kapasitas anggota TPID dalam pengendalian inflasi di wilayah Jawa Barat;
2. Rapat Koordinasi Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 5 kali selama Triwulan IV;
3. *High Level Meeting* TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 11 Desember 2024 untuk menentukan langkah dan strategi pengendalian inflasi yang tepat menghadapi HBKN Natal dan Tahun Baru;
4. Rapat Koordinasi TPID Wilayah Jawa yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur pada 20 November 2024;
5. Pemantauan Harga Pangan di 81 Pasar oleh Kabupaten/Kota setiap hari yang disajikan dalam SILINDA JABAR;
6. Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) sebanyak 3 kali selama Triwulan IV;
7. Konsinyering Penilaian PINUNJUL *Award* 2024 pada 8 – 9 November 2024. PINUNJUL *Award* 2024 merupakan penghargaan yang diberikan oleh TPID Provinsi sebagai motivasi kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam menciptakan program-program pengendalian inflasi daerah yang inovatif, memperkuat data pendukung pengendalian inflasi, serta menjaga ketersediaan pangan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama tahun 2023.
8. *Desk* Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 pada 4 Desember 2024.
9. Konsolidasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan Kab/Kota pada 10 Desember 2024.
10. Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Pangan pada 24 Desember 2024 dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian isu-isu strategis di bidang pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kegiatan dipimpin oleh Menko Bidang Pangan dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Forkopimda/Instansi Vertikal Provinsi dan Kab/Kota, Bupati/Walikota, Perangkat Daerah/Lembaga Provinsi, dan Perangkat Daerah Kab/Kota.
11. Survei Harga Pangan Strategis di Pasar 27 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap bulan.
12. Pengelolaan stok beras dan komoditas lain oleh BULOG bulan Desember 2024, dengan 4.

rincian sebagai berikut:

- a. Beras: 184.766.903 kg
 - b. Gula Pasir: 383.912 kg
 - c. Daging Sapi: 1.649 kg
 - d. Minyak Goreng: 200.391,5 L
 - e. Tepung Terigu: 35.132 kg
13. Pengadaan beras dalam negeri per 31 Desember 2024 sebesar 254.754,29 ton;
 14. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 100.356.601 Kg;
 15. Penyaluran bantuan pangan oleh BULOG sebanyak 133.368.030 Kg per 31 Desember 2024;
 16. OPADI Kenaikan harga tertentu di 19 Kabupaten/Kota serta OPADI menjelang Nataru di 8 Kabupaten/Kota.
 17. Pengadaan stok beras CPPD sebanyak 5.926,71 ton yang terdiri dari CPPD Provinsi sebesar 2.529,51 ton dan CPPD Kabupaten/Kota sebesar 3.397,2 ton.
 18. Fasilitasi bantuan pemerintah Tahun 2024 terkait menurunkan tingkat kehilangan hasil tanaman pangan berupa fasilitasi sarana combine harvester besar sebanyak 40 unit yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 brigade provinsi melalui sumber anggaran APBN Pusat.
 19. Revitalisasi *Rice Milling Unit* (RMU) sebanyak 26 unit.
 20. Pemberian akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan di bawah harga pasar melalui Mobil Paling Juara sebanyak 49 kali di Tahun 2024;
 21. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 651 kali sampai dengan 31 Desember 2024;
 22. Fasilitasi distribusi komoditas pangan pokok strategis sebanyak 1.508.500 Kg sampai dengan 31 Desember 2024;
 23. Penyaluran Bantuan Pangan sampai dengan Bulan Desember 2024 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebanyak 88.912.020 Kg yang disalurkan di 27 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Sektor produksi pangan strategis, khususnya komoditas beras, jagung, bawang merah, dan cabai masih rentan dalam menghadapi anomali maupun gangguan cuaca sementara pada komoditas peternakan masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan;
 2. Penguatan dan pemutakhiran data ketersediaan dan kebutuhan serta data harga komoditas pangan strategis;
 3. Pengelolaan stok belum optimal yang menyebabkan kekurangan saat bukan musim panen;
 4. Ketergantungan terhadap komoditas pangan impor, seperti bawang putih, jagung, gandum, gula pasir, dan lain-lain;
 5. Tingginya hasil panen yang hilang dalam rantai pasok pangan;
 6. Monitoring program/kegiatan terkait pengendalian inflasi daerah.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode Triwulan-IV 2024 di antaranya :

1. Optimalisasi peran BUMD dalam ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis;
2. Memanfaatkan data P3KE untuk menentukan titik-titik lokasi pelaksanaan GPM/Pasar Tani dan kegiatan sejenisnya;
3. Mengembangkan benih komoditas pangan impor agar dapat dikembangkan di Jawa Barat dan pengembangan komoditas lokal yang dapat menggantikan komoditas pangan impor tersebut, seperti sorgum;
4. Antisipasi ketersediaan pasokan pangan dan energi menjelang HBKN Nataru serta adanya perubahan iklim pada Triwulan-IV;
5. Memperkuat sistem bank pangan maupun sistem/inovasi yang membantu dalam pencegahan dan pengurangan *food loss* dan *food waste* di setiap titik rantai pasok pangan;
6. Melaksanakan *capacity building* untuk PIC Kabupaten/Kota aplikasi pemantauan harga Jawa Barat (SILINDA JABAR).